

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

A. Transkrip Wawancara

Nama Informan : Bapak Ristony selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tanggal : 22 Juni 2026
Jam : 10.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor BPBD Kabupaten Bojonegoro

Peneliti	Bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam setiap pertemuan? Apakah berjalan dua arah atau cenderung instruktif?
Informan	Pola komunikasi yang kami bangun dalam forum pertemuan berjalan dua arah secara partisipatif, di mana BPBD memfasilitasi data teknis, pihak swasta memberikan dukungan sumber daya, dan masyarakat menyampaikan kondisi riil lapangan demi menghindari instruksi yang kaku.
Peneliti	Apakah terdapat mekanisme untuk saling berbagi data atau informasi tentang potensi risiko banjir? Bagaimana efektivitasnya?
Informan	Mekanisme berbagi data risiko banjir telah berjalan efektif dan responsif melalui integrasi sistem peringatan dini (EWS) resmi berskala besar serta pemanfaatan grup komunikasi digital taktis yang melibatkan relawan dan lintas sektor di lapangan.
Peneliti	Bagaimana bentuk komitmen lembaga Anda dalam melaksanakan hasil keputusan bersama?
Informan	BPBD berkomitmen nyata dengan melegalkan hasil keputusan bersama ke dalam dokumen rencana kontinjensi daerah, mengalokasikan personel dan logistik secara tepat, serta konsisten menggelar simulasi bencana gabungan berkala.
Peneliti	Bagaimana koordinasi antarinstansi dan antarwilayah dalam menjalankan kegiatan mitigasi dan tanggap darurat?
Informan	Koordinasi mitigasi dan tanggap darurat dijalankan secara terpadu melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana untuk membagi klaster kerja internal, sekaligus menjaga komunikasi real-time lintas kabupaten guna memantau pergerakan debit air Bengawan Solo.
Peneliti	Bagaimana dampak kolaborasi ini terhadap kesiapsiagaan masyarakat atau lembaga Anda sendiri?
Informan	Walaupun masih terdapat ego sektoral, tetapi kolaborasi multi-pihak ini berhasil meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan di internal BPBD dan secara signifikan mengubah paradigma masyarakat di

	tingkat desa menjadi lebih mandiri serta proaktif dalam menghadapi risiko bencana.
--	--

Nama Informan : Bapak Muntasir Divisi Pendukung dan Hubungan Eksternal (*Corporate & Support Divisions*) dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

Tanggal : 7 Juli 2026

Jam : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor BPBD Kabupaten Bojonegoro

Peneliti	Bagaimana pola komunikasi yang terjadi antara pihak EMCL selaku sektor swasta dengan BPBD dan Pemerintah Kelurahan Ledok Wetan dalam setiap pertemuan sinkronisasi program? Apakah berjalan dua arah secara deliberatif atau cenderung instruktif?
Informan	Bagi kami di EMCL, komunikasi selalu diupayakan berjalan dua arah. Kami tidak memosisikan diri hanya sebagai penyumbang dana pasif, melainkan mitra setara. Melalui forum-forum resmi maupun koordinasi berkala yang difasilitasi oleh BPBD, kami berdialog langsung untuk menyamakan persepsi. Kami mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan riil di lapangan.
Peneliti	Apakah terdapat mekanisme keterbukaan informasi untuk saling berbagi data atau potensi risiko banjir antara EMCL dengan pemangku kepentingan lainnya? Bagaimana efektivitasnya?
Informan	Membangun kepercayaan membutuhkan transparansi data. Dalam hal mitigasi banjir, kami sangat terbuka mengenai alokasi kapasitas logistik dan anggaran CSR yang kami plot untuk kebencanaan. Sebaliknya, kami juga mengandalkan data spasial peta risiko banjir dan pembaruan Tinggi Muka Air (TMA) dari BPBD serta komunitas lokal. Sejauh ini, mekanisme saling berbagi informasi melalui platform koordinasi bersama cukup efektif, karena mengikis kecurigaan lintas sektor dan membuat intervensi CSR kami tepat sasaran.
Peneliti	Bagaimana bentuk komitmen nyata dari manajemen EMCL dalam melaksanakan hasil keputusan bersama yang telah disepakati di dalam forum kolaborasi mitigasi bencana?
Informan	Komitmen kami diwujudkan melalui konsistensi. Ketika blue print atau rencana kontinjensi mitigasi daerah disepakati, EMCL berkomitmen mengintegrasikan program CSR kami ke dalam sistem tersebut. Kami menempatkan rasa memiliki yang tinggi terhadap ketahanan wilayah Bojonegoro. Perwujudannya bukan sekadar bantuan saat emergency, tapi komitmen jangka panjang dalam pendanaan infrastruktur evakuasi skala lokal dan pembinaan kapasitas relawan.

Peneliti	Bagaimana koordinasi lintas sektor ini dalam menyamakan persepsi mengenai definisi masalah banjir luapan sungai di Bojonegoro, sehingga ego sektoral antarinstansi bisa diredam?
Informan	Kami menyepakati bahwa banjir Bengawan Solo di Bojonegoro adalah masalah sistemik yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Sektor swasta harus ambil bagian. Lewat pemahaman bersama ini, kami meruntuhkan ego sektoral. Fokus kami bukan lagi menonjolkan bendera instansi masing-masing, melainkan bagaimana melengkapi celah (gap) sumber daya yang dimiliki BPBD demi keselamatan warga terdampak.
Peneliti	Apakah ada dampak nyata atau 'small wins' jangka pendek yang berhasil diproduksi dari jaringan kolaborasi antara EMCL, pemerintah, dan masyarakat sejauh ini?
Informan	Tentu ada beberapa hasil antara yang krusial. Salah satunya adalah terbentuknya sistem peringatan dini berbasis komunitas dan pengadaan fasilitas posko evakuasi alternatif yang ramah warga di wilayah terdampak. Keberhasilan kecil seperti simulasi evakuasi bersama dan draf prosedur taktis tanggap bencana menjadi bukti konkrit bahwa kolaborasi ini memberikan manfaat nyata secara psikologis dan operasional sebelum banjir tahunan datang..

Nama Informan : Ibu Dr. Heri Mulyanti, S.Si., M.Sc selaku Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro
 Tanggal : 24 Juni 2026
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat Wawancara : Ruang Kelas di Fakultas Sains dan Teknik

Peneliti	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kualitas komunikasi dan intensitas dialog tatap muka antara Pemkab (BPBD), sektor swasta (EMCL/PEPC), akademisi, dan komunitas seperti Destana dalam merumuskan strategi mitigasi banjir di Bojonegoro? Apakah sudah bersifat deliberatif (setara) atau masih instruktif (<i>top-down</i>)?
Informan	Kita di Unigoro melihat belum ada forum komunikasi berkala yang setara yang khusus mendudukkan kolaborasi ini untuk membedah masalah secara proaktif sebelum musim penghujan tiba. Ego sektoral atau <i>silo mentality</i> masih terasa karena setiap aktor masih berjalan dengan target instansinya masing-masing
Peneliti	Dalam konsep <i>Collaborative Governance</i> , kepercayaan dibangun melalui transparansi data. Menurut Bapak/Ibu, seberapa terbuka pembagian data (seperti data spasial, peta risiko, hingga komitmen anggaran CSR) antar aktor pelaksana saat ini? Apa hambatan utamanya?
Informan	Ini salah satu <i>critical point</i> di Bojonegoro. Tingkat kepercayaan kelembagaan kita masih terhambat oleh hambatan birokrasi dan keterbukaan informasi. BPBD memiliki peta risiko, swasta memiliki

	peta pemukiman terdampak di sekitar wilayah operasi mereka, dan kami di akademisi memiliki pemodelan geospasial. Namun, data-data ini belum terintegrasi ke dalam satu sistem <i>database</i> bersama.
Peneliti	Bagaimana Bapak/Ibu menilai komitmen dari sektor swasta EMCL serta akademisi sendiri dalam keterlibatan jangka panjang manajemen risiko banjir di tingkat tapak, seperti di Kelurahan Ledok Wetan?
Informan	Jika bicara komitmen saat fase tanggap darurat (saat bencana), komitmen semua pihak luar biasa tinggi. Korporasi migas langsung menurunkan bantuan logistik dan ambulans. Di sini letak kelemahannya. Program CSR mitigasi banjir dari swasta sering kali bersifat <i>ad-hoc</i> (sementara) dan berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi dengan <i>blue print</i> jangka panjang daerah.
Peneliti	Apakah kolaborasi yang berjalan selama ini sudah menghasilkan dampak jangka pendek yang nyata bagi penguatan kapasitas kelembagaan atau ketahanan masyarakat di Kelurahan Ledok Wetan?
Informan	Ada beberapa <i>small wins</i> atau hasil antara yang patut diapresiasi. Contohnya adalah terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) di Ledok Wetan yang diinisiasi BPBD, di mana beberapa kali simulasi evakuasi melibatkan kelompok pemuda lokal. Namun, hasil antara ini belum maksimal karena belum dilembagakan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas sektor yang komprehensif. Kita butuh hasil antara yang lebih konkret, misalnya sebuah sistem peringatan dini berbasis komunitas (<i>Community-based Early Warning System</i>) yang datanya disuplai oleh teknologi akademisi dan pendanaannya didukung oleh CSR swasta.
Peneliti	Menurut Ibu, seberapa urgent penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam mitigasi risiko bencana banjir dibandingkan dengan penerapan yang bersifat top-down?
Informan	Kalau menurut saya, penerapan <i>Collaborative Governance</i> sangat urgen karena mitigasi banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial (top-down). Diperlukan sinergi yang inklusif, terutama mengoptimalkan peran akademisi pada fase pra-bencana untuk menghasilkan kebijakan mitigasi yang berbasis data ilmiah.

Nama Informan : Bapak Arif selaku Kepala Seksi Kesejahteraan
Kelurahan Ledok
Tanggal : 15 Juni 2026
Jam : 11.00 WIB
Tempat Wawancara : Kantor Kelurahan Ledok

Peneliti	Bagaimana gambaran umum mengenai kerawanan dan dampak banjir luapan Sungai Bengawan Solo di wilayah Kelurahan Ledok Wetan dalam beberapa tahun terakhir?
----------	--

Informan	Ledok Wetan ini bisa dibilang wilayah langganan tetap kalau Bengawan Solo meluap. Dalam beberapa tahun terakhir, polanya makin sulit ditebak karena faktor cuaca ekstrem. Begitu hilir banjir atau ada kiriman air dari hulu (seperti daerah Solo, Ngawi, Madiun) ditambah pintu air Bengawan Solo masuk siaga merah, wilayah bantaran kita langsung tergenang. Dampaknya bukan cuma merendam pemukiman warga di RT-RT rawan, tapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, merusak sanitasi, dan menyisakan lumpur pasca-banjir. Kerugian materiil jelas ada, tapi yang paling kami waspadai adalah dampak psikologis warga yang selalu was-was tiap kali hujan deras turun berhari-hari.
Peneliti	Siapa saja aktor luar (seperti BPBD, Dinas PU SDA, perusahaan swasta/CSR migas, akademisi, atau LSM) yang selama ini secara formal maupun informal menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan dalam penanganan banjir?
Informan	Kalau ditanya siapa saja, aktornya cukup banyak dan punya porsi masing-masing. Dari BPBD Kabupaten Bojonegoro adalah mitra utama kami dalam hal kedaruratan dan logistik. Lalu ada Dinas PU SDA yang memegang kendali teknis soal tanggul, pintu air, dan pompa di kawasan Ledok Wetan. Untuk relawan kemanusiaan, mereka sangat aktif saat evakuasi. Sementara untuk pihak swasta/CSR migas, hubungannya lebih sering bersifat informal misalnya bantuan sembako atau tenda darurat saat masa tanggap darurat.
Peneliti	Apakah ada forum atau pertemuan rutin yang mempertemukan pihak kelurahan, perwakilan masyarakat (Destana/RT/RW), BPBD, dan sektor swasta khusus untuk membahas mitigasi banjir?
Informan	Kalau forum rutin khusus yang mengumpulkan semua aktor sekaligus secara terjadwal itu belum ada agenda tetap bulanan. Biasanya, dialog tatap muka terjadi saat rapat koordinasi yang diinisiasi oleh BPBD menjelang musim hujan memasuki siaga bencana. Kalau di tingkat bawah, kami di kelurahan sering ngobrol langsung dengan pengurus RT/RW dan teman-teman Destana (Desa/Kelurahan Tangguh Bencana) secara swadaya, tapi pihak swasta jarang sekali ikut di obrolan tingkat bawah ini.
Peneliti	Apakah saluran komunikasi informal seperti WhatsApp Group digunakan untuk koordinasi harian? Apa saja kendala dalam komunikasi tersebut?
Informan	Oh iya, WhatsApp Group itu modal utama kami untuk koordinasi harian, apalagi kalau air sudah mulai naik. Kita punya WhatsApp Group internal Kelurahan dengan RT/RW dan Destana, dan ada juga grup koordinasi lintas sektor dengan pihak Kecamatan dan BPBD. Kendalanya kadang respon dari instansi teknis di grup agak lambat karena mereka harus mengcover banyak wilayah di Bojonegoro, bukan cuma Ledok Wetan saja.

Peneliti	Bagaimana keterbukaan informasi dan data (misalnya peta risiko banjir, data warga terdampak, atau informasi logistik) dibagikan di antara kelurahan, BPBD, dan pihak swasta?
Informan	Untuk data dasar seperti jumlah warga terdampak, jumlah lansia, balita, dan kebutuhan logistik, kami di kelurahan selalu terbuka dan menyuplainya ke BPBD secara berkala. Informasi ketinggian air (TMA/Tinggi Muka Air) dari BPBD juga diteruskan ke kami dengan cepat. Yang masih agak terbatas adalah akses bersama terhadap peta risiko banjir yang detail atau rencana makro penataan drainase dari dinas teknis.
Peneliti	Bagaimana pihak kelurahan melihat kontribusi dan konsistensi dari aktor lain (seperti BPBD atau CSR Swasta) ketika kondisi sedang tidak banjir (fase pra-bencana)? Apakah mereka tetap aktif terlibat?
Informan	Ini tantangan besarnya. Saat tidak banjir atau musim kemarau, tensi kolaborasi ini cenderung menurun. BPBD tetap rutin memantau dan kadang mengadakan pelatihan simulasi. Tapi untuk aktor lain seperti dinas teknis atau CSR swasta, fokusnya sering teralih ke program lain. Padahal, fase pra-bencana justru waktu krusial untuk memperbaiki tanggul atau menata sistem drainase lingkungan.
Peneliti	Apakah ada batasan peran dan misi yang jelas tertulis (seperti dokumen kesepakatan) agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi di lapangan?
Informan	Kalau dokumen kesepakatan formal yang spesifik mengikat antara Kelurahan - BPBD - Swasta - Masyarakat secara kolektif itu belum ada. Pembagian peran saat ini mayoritas masih didasarkan pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) normatif kedinasan dari Pemkab, panduan umum kebencanaan dari BPBD, serta kebiasaan penanganan banjir tahun-tahun sebelumnya.
Peneliti	Apa saja hasil nyata berskala kecil yang sudah berhasil diproduksi dari hasil kerja sama lintas sektor ini? (Contoh: Apakah sudah ada draf Standar Operasional Prosedur/SOP tingkat kelurahan, pembentukan Destana yang aktif, atau suksesnya simulasi evakuasi bersama) ?
Informan	yang paling nyata adalah terbentuk dan aktifnya forum Destana di Ledok Wetan. Ini aset besar. Berkat kolaborasi dengan BPBD, anggota Destana kami sudah terlatih melakukan evakuasi mandiri dan pertolongan pertama.
Peneliti	Dalam menyusun rencana kontinjensi atau peta evakuasi tingkat kelurahan, bagaimana pelibatan akademisi/riset lokal maupun pendanaan CSR swasta diakomodasi oleh kelurahan?
Informan	Kebanyakan dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang masuk ke kami berupa barang siap pakai seperti bantuan tenda atau logistik darurat yang baru diserahkan saat mendekati musim penghujan, belum masuk ke dalam pendanaan program mitigasi struktural atau non struktural yang terencana sejak awal tahun anggaran.

Peneliti	Ketika luapan Bengawan Solo mulai menggenangi permukiman, bagaimana pembagian peran instan (kelurahan sebagai simpul logistik, BPBD evakuasi, Dinsos dapur umum, dan Destana sebagai first responder) digerakkan secara kolaboratif? Apakah masih ada ego sektoral di lapangan?
Informan	Kelurahan langsung bertindak sebagai simpul informasi dan koordinator logistik tingkat lokal, memastikan kiriman bantuan dari Dinas Sosial tersalurkan. BPBD memimpin proses evakuasi warga yang terjebak bersama relawan, dan dibantu teman-teman Destana karena mereka yang paling hafal medan dan kondisi warga perkampung. Kalau di tingkat bawah saat darurat, ego sektoral itu cair karena semua fokus menyelamatkan nyawa manusia. Hambatannya lebih ke masalah teknis dilapangan.
Peneliti	Setelah banjir surut, bagaimana koordinasi kelurahan dengan Dinas PU SDA atau swasta dalam melakukan evaluasi kerusakan fasilitas fisik (tanggul/drainase) serta pemulihan ekonomi masyarakat?
Informan	Setelah banjir surut, kelurahan segera melakukan pendataan kerusakan sarana fisik (seperti tanggul jebol, jalan lingkungan rusak, atau drainase mampet) dan melaporkannya ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) atau Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Nama Informan : Bapak Gatot Supriadi selaku perwakilan Desa Tangguh Bencana
Tanggal : 18 Juni 2026
Jam : 08.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Gatot Supriadi

Peneliti	Bagaimana pola komunikasi atau pertemuan rutin yang dibangun antara Destana, Pemerintah Kelurahan, BPBD Kabupaten Bojonegoro, dan pihak swasta (seperti EMCL/PEPC) dalam membahas risiko banjir?
Informan	Kalau pertemuan formal yang dijadwal rapi itu biasanya nunggu undangan dari pihak Kelurahan atau BPBD, mas. Misal pas mau masuk musim hujan, baru kita dikumpulin buat rapat koordinasi. Tapi kalau sama pihak swasta kaya EMCL atau PEPC, kita jarang bisa ketemu langsung dalam satu forum yang sama. Biasanya kalau ada bantuan CSR dari swasta, itu lewatnya ke BPBD atau Kelurahan dulu, baru diturunkan ke kita. Jadi komunikasinya belum bisa dibilang sejajar duduk bareng-bareng melingkar gitu, masih banyak lewat perantara.
Peneliti	Selama forum diskusi tersebut berjalan, apakah pendapat dari forum relawan Destana dan aspirasi warga didengar secara setara, atau interaksinya cenderung kaku (instruktif dari atas)?

Informan	Kalau pas rapat, kita dari Destana dipersilakan kok buat ngomong atau usul, karena kan kita yang paling tahu lekuk-lekuk gang di Ledok Kulon yang paling cepat kerendem air. Cuma ya gitu, karena kita ini levelnya relawan tingkat kelurahan, kadang usulan kita sifatnya cuma ditampung. Keputusan akhir, anggaran, atau kebijakan tetep ada di tangan yang di atas (BPBD atau Dinas). Jadi dibilang kaku banget ya enggak, tapi dibilang setara banget ya belum, Mas. Masih seringan kita dengerin instruksi.
Peneliti	Hambatan apa yang paling sering muncul ketika Anda melakukan dialog langsung dengan instansi birokrasi atau perusahaan swasta?
Informan	Hambatan paling berasa itu di birokrasi dan waktu tanggap, mas. Kita orang lapangan kan pengennya serba cepet, apa yang kurang langsung diadain. Tapi kalau lewat instansi pemerintah, urusannya panjang, harus pakai surat ini-itu, pengajuan proposal dulu, nunggu tanda tangan. Kadang banjirnya udah surut, bantuannya baru cair. Kalau sama swasta, hambatannya kita bingung aksesnya, karena mereka punya prosedur sendiri yang ribet buat orang biasa kaya kami.
Peneliti	Sejauh mana keterbukaan informasi yang Anda rasakan dari pihak BPBD maupun Kelurahan terkait pemetaan zona risiko banjir, rencana kontinjensi, ataupun alokasi anggaran penanganan banjir?
Informan	Kalau soal data daerah rawan atau info perkembangan air (TMA), BPBD sekarang udah terbuka banget. Malah kita punya grup WhatsApp bareng, jadi info air naik itu cepet tersampaikan. Tapi kalau ditanya soal keterbukaan alokasi anggaran penanganan bencana atau dana CSR, nah itu kita bener-bener buta. Kita di Destana ga pernah tahu nominal pastinya berapa. Kita taunya terima barang atau fasilitas aja, misal tenda, sembako, atau pelampung.
Peneliti	Apakah pernah ada konflik kepentingan atau ketidakpercayaan (skeptisisme) di masa lalu antar-aktor yang menghambat kerja sama? Jika ada, bagaimana cara membangun kembali kepercayaan tersebut?
Informan	Dulu sempet ada rasa kurang percaya, terutama dari warga ke pemerintah. Warga sering mikir, "Ah, rapat-rapat terus tapi pas banjir tetep aja kita keleleran." Jadi ada semacam trauma atau skeptis. Cara kita ngebangun laginya ya lewat pembuktian di lapangan. Kita dari Destana berusaha jadi jembatan. Pas banjir, kita tunjukin kalau kita langsung turun evakuasi, ngurus dapur umum, ga cuma teori. Dari situ pelan-pelan warga dan pemerintah mulai percaya lagi sama fungsi Destana ini.
Peneliti	Bagaimana bentuk komitmen nyata dari pengurus Destana sendiri dalam mengawal dan menjalankan keputusan-keputusan yang sudah disepakati di tingkat kabupaten atau kelurahan?
Informan	Komitmen kita jangan ditanya, Mas. Namanya juga relawan, modal utamanya ya cuma niat ngebantu tetangga sama tenaga. Apapun yang udah disepakati di kelurahan, misal pembagian piket jaga posko atau titik evakuasi, temen-temen Destana pasti standby 24 jam taruhannya

	nyawa dan waktu buat keluarga, padahal rumah kita sendiri kadang ya ikut banjir.
Peneliti	Apakah pihak lain (Pemerintah Kelurahan, BPBD, Swasta, Akademisi) dinilai konsisten dalam menjalankan janji dan porsi tanggung jawab mereka, atau kerja sama ini hanya aktif saat banjir sudah meluap saja?
Informan	Nah, ini dia. Kalau komitmen dari pihak luar itu seringkali anget-anget tahi ayam. Pas air Bengawan Solo lagi meluap tinggi-tingginya, waduh... semua orang datang. BPBD standby, swasta kirim bantuan foto-foto, pejabat pada ninjau. Tapi pas kemarau atau pas pra-bencana (masa persiapan), ya sepi lagi. Pelatihan jarang, koordinasi ya seadanya. Jadi kesannya aktif pas lagi darurat aja.
Peneliti	Apakah saat ini seluruh pihak (Pemerintah, Destana, Swasta, dan Warga) sudah memiliki kesepakatan dan pemahaman yang sama mengenai penyebab utama, dampak sistemik, serta pembagian peran dalam menghadapi banjir Bengawan Solo di Ledok Wetan?
Informan	Kalau pemahaman soal "Kenapa Ledok Kulon banjir" sih semua udah tahu ya, Mas, karena posisi kita di bantaran sungai. Tapi kalau soal pembagian peran, jujur masih sering tumpang tindih. Kadang warga mikir semua masalah banjir itu tanggung jawab penuh BPBD atau Destana. Padahal warga sendiri juga punya peran buat ga buang sampah ke sungai atau nyiapin surat berharga di tas siaga. Jadi pemahaman bareng-bareng soal "siapa harus berbuat apa" itu belum matang bener
Peneliti	Bagaimana menyelaraskan perbedaan sudut pandang antara kepentingan ekonomi/bisnis (sektor swasta) dengan pemulihan sosial-lingkungan (masyarakat)?
Informan	Susah-susah gampang, Mas. Pihak swasta kan mikirnya bisnis, untung-rugi, atau sebatas gugur kewajiban lewat CSR. Sementara kita mikirnya gimana biar nyawa warga aman dan kampung ga lumpuh. Cara menyelaraskannya, kita dari kelurahan selalu nekanin kalau lingkungan sekitar perusahaan atau kelurahan ini aman dari konflik sosial akibat bencana, operasional bisnis mereka juga bakal lebih tenang. Jadi kita ketemunya di titik "sama-sama butuh aman".
Peneliti	Apa saja hasil nyata berskala kecil (small wins) yang sudah berhasil diproduksi dari jaringan kerja sama ini? (Contoh: Apakah sudah melahirkan draf SOP lokal, peta evakuasi bersama, atau suksesnya simulasi mandiri?)
Informan	Alhamdulillah, dari proses yang udah berjalan ini, kita udah punya peta jalur evakuasi yang disepakati bareng kelurahan, jadi warga ga bingung lagi lari ke mana kalau air naik.
Peneliti	Apakah keberhasilan-keberhasilan kecil tersebut mampu meningkatkan motivasi warga dan memperkuat kekompakan jaringan kolaborasi lintas sektor ini?
Informan	Jelas pengaruh bange. Biarpun cuma peta jalur evakuasi atau simulasi kecil-kecilan, warga jadi merasa lebih tenang karena ngerasa ada

	yang ngurusin dan jalurnya jelas. Kekompakan temen-temen relawan juga makin kuat karena ngerasa kerja keras kita ada wujud nyatanya, ga cuma omong doang di balai desa.
Peneliti	Bentuk pelatihan, edukasi, atau simulasi kebencanaan apa saja yang pernah diterima oleh pengurus Destana dan warga Ledok Wetan? Siapa saja aktor yang mendanai atau melatih kegiatan tersebut (BPBD, CSR Swasta, atau Akademisi)?
Informan	Pernah beberapa kali ikut pelatihan, Mas. Biasanya diadakan sama BPBD Bojonegoro, diajarin cara evakuasi pakai perahu karet, pertolongan pertama (P3K), sama dapur umum. Kalau soal dana, mayoritas mutlak dari anggaran APBD lewat BPBD, kalau dari CSR swasta langsung buat pelatihan Destana rasanya jarang banget, paling bentuknya barang posko.
Peneliti	Bagaimana efektivitas sistem peringatan dini (early warning system) yang berjalan di kelurahan saat memantau Tinggi Muka Air (TMA) Bengawan Solo? Apakah informasinya tersampaikan dengan cepat ke warga?
Informan	Kalau alat EWS otomatis yang bunyi sirine keras itu kadang eror atau kurang kedengeran sampai pelosok gang. Tapi untungnya, kita punya "EWS manual" yang paling efektif: yaitu info update TMA dari grup WA relawan, terus disambung pakai speaker musholla/masjid. Itu malah lebih ampuh buat bangunin warga pas tengah malem airnya jebol.
Peneliti	Ketika air sungai mulai menggenangi permukiman warga Ledok Wetan, bagaimana mekanisme pembagian peran di lapangan? Apa tugas spesifik Destana dan bagaimana koordinasinya dengan komando utama BPBD atau Dinsos?
Informan	Begitu air masuk pemukiman, Destana langsung bagi tugas. Ada tim yang khusus nyisir rumah warga lansia/anak-anak pake perahu buat diangkut ke tanggul atau tempat pengungsian kelurahan. Ada tim yang jaga posko pantau. Nah, koordinasi ke BPBD itu satu pintu lewat Ketua Destana atau Pak Lurah, buat minta bantuan armada perahu tambahan atau logistik darurat ke Dinsos kalau stok kelurahan habis.
Peneliti	Setelah banjir surut, bantuan apa saja yang diberikan oleh jejaring kolaborasi (Pemerintah, CSR, Relawan) dalam tahap pemulihan fisik pemukiman maupun pemulihan ekonomi warga?
Informan	Pasca banjir itu yang paling repot, Mas. Biasanya bantuan yang datang itu paket sembako buat nyambung hidup karena warga belum bisa kerja, terus ada bantuan obat-obatan dari Dinkes/Puskesmas karena mulai banyak yang sakit. Kalau bantuan fisik rumah rusak biasanya nunggu pendataan dari BPBD/Kelurahan buat diajuin bansos, tapi prosesnya lama. Kalau swasta biasanya ngasih bantuan alat pembersih atau tangki air bersih buat nyemprot lumpur di fasilitas umum kayak sekolah atau masjid.

Nama Informan : Bapak Supriyanto selaku Ketua RT 7/ Rw 1 Ledok
 Tanggal : 2 Juli 2026
 Jam : 10.00 WIB
 Tempat Wawancara : Rumah Bapak Supriyanto

Peneliti	Bagaimana bentuk komunikasi atau interaksi yang sering terjadi antara kelurahan/BPBD dengan bapak selaku ketua RT dalam membahas persiapan menghadapi banjir musiman?
Informan	Kalau komunikasi, alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih cepat mas. Biasanya lewat grup WhatsApp khusus yang isinya para Ketua RT, pihak Kelurahan, dan perwakilan petugas BPBD. Begitu ada info dari hulu atau TMA (Tinggi Muka Air) di Karangnongko mulai siaga, pihak kelurahan atau BPBD langsung share ke grup.
Peneliti	Bagaimana koordinasi RT dengan pihak swasta dalam transparansi bantuan fisik/fasilitas di lingkungan RT ini?
Informan	Jujur kalau koordinasi langsung antara RT dengan pihak swasta atau perusahaan besar itu jarang sekali terjadi secara mandiri. Biasanya bantuan dari swasta (seperti program CSR atau komunitas peduli) itu pintunya satu lewat posko utama di Kelurahan atau BPBD dulu, baru nanti didistribusikan ke tingkat RT sesuai data warga yang terdampak. Tapi, kalau ada swasta yang langsung turun ke lapangan memberikan bantuan fisik misalnya tenda darurat, sembako, atau pembenahan fasilitas pos ronda saya sebagai
Peneliti	Saat terjadi banjir, bagaimana bentuk tanggung jawab dan pembagian tugas yang disepakati bersama antara RT, warga, dan relawan?
Informan	Kami sudah punya kesepakatan tidak tertulis tapi berjalan tiap tahun. Tugasnya dibagi begini: Saya selaku Ketua RT, berfokus pada koordinasi, mendata warga yang sudah mengungsi atau yang masih bertahan di rumah (terutama lansia dan anak-anak), serta menjadi penghubung ke posko kelurahan untuk meminta bantuan. Untuk warga (khususnya pemuda/bapak-bapak yang Tangguh), biasanya membantu proses evakuasi barang-barang berharga milik tetangga ke tempat yang aman dan menjaga keamanan lingkungan dari potensi pencurian saat rumah kosong ditinggal mengungsi dan selaku relawan (BPBD/Tagana/Komunitas), berfokus pada evakuasi warga menggunakan perahu karet, menyediakan dapur umum, dan penanganan medis darurat. Mereka bergerak berdasarkan pemetaan lokasi yang kami (RT) berikan.
Peneliti	Bagaimana koordinasi yang terjadi saat bencana terjadi? Apakah masih ada tumpang tindih antar peran atau sudah ada kesamaan pemahaman mengenai apa saja hal yang harus diutamakan ?
Informan	Secara garis besar sudah ada kesamaan pemahaman, mas. Karena banjir ini musiman, warga dan relawan sudah otomatis tahu apa yang harus diutamakan, yaitu keselamatan nyawa manusia dahulu, baru

	evakuasi barang. Kalau dibilang tumpang tindih 100% sih tidak, tapi kalau bingung sesaat di hari pertama air naik itu wajar.
Peneliti	Apa saja hasil/bantuan yang sudah diberikan setelah terjadi bencana, apakah ada bantuan logistik atau perbaikan fasilitas?
Informan	Kalau pasca-bencana atau saat air mulai surut, bantuan logistik utama biasanya berupa paket sembako, nasi bungkus dari dapur umum, air bersih untuk minum, dan obat-obatan dari Puskesmas karena banyak warga yang mulai gatal-gatal atau kutu air. Kelurahan dan BPBD juga sering drop bantuan alat pembersih seperti kaporit, karbol, dan sekop untuk membersihkan lumpur di rumah warga. Untuk perbaikan fasilitas fisik, kalau skalanya kecil seperti membersihkan selokan tersumbat atau benerin kabel pos ronda, kami lakukan swadaya (kerja bakti warga). Tapi kalau ada fasilitas umum yang rusak berat seperti jalan paving yang ambles atau tanggul yang jebol, saya buat laporan tertulis ke pihak Kelurahan untuk diteruskan ke Dinas terkait.

**Lampiran 2 - Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
188/46/KEP/412.013/2019, Tentang Tim Search And Rescue (SAR)
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019**



TENTANG

**TIM SEARCH AND RESCUE PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, maka Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- 2 -

1	2	3	4
19.	RAYA HARI SANTOSO	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
20.	KISWANTO	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
21.	MARDOYO	Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
22.	NGALIM, S.Kep. Ns	Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
23.	AGUS PRIBADI, S.Kep, Ns	Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.	Anggota
24.	TAUFAN WIDODO	Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
25.	ABDULLAH ZAHID	PMI.	Anggota

BUPATI BOJONEGORO,



DR. HJ. ANNA MU'AWANAH

- 3 -

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- KESATU : Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan operasi SAR, yaitu usaha dan kegiatan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang/dikhawatirkan hilang/menghadapi bahaya dalam musibah dan/atau bencana/musibah lainnya.
- KETIGA : Tim *Search and Rescue* Penanganan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per anggota pada setiap pelaksanaan tugas penanggulangan saat kejadian bencana.
- KEEMPAT : Tim *Search and Rescue* Penanganan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim *Search and Rescue* Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 Maret 2019

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada: **DR. HJ. ANNA MU' AWANAH**

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Baperwil Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Tim SAR yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 46 /KEP/412.013/2019
 TANGGAL : 6 MARET 2019

**TIM SEARCH AND RESCUE PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019**

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. YUDI HENDRO KARTONO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Komandan
2.	EKO SUSANTO, SH	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Wakil Komandan
3.	Kapten Inf. MARWOKO SUWANDONO	Kodim 0813 Bojonegoro.	Komandan Lapangan
4.	AKP NAF'AN, A.Md, Kep, SH, MM	Rumah Sakit Bhayangkara Bojonegoro.	Komandan Lapangan
5.	Aiptu SUYANTO, SH	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro.	Komandan Lapangan
6.	Aiptu DEDI WIDIARSO	Polres Bojonegoro.	Komandan Lapangan
7.	SUKIRNO, S.Sos., MM	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.	Komandan Lapangan
8.	Pelda GUNAWAN	Kodim 0813 Bojonegoro.	Anggota
9.	Serma LUGITO	Kodim 0813 Bojonegoro.	Anggota
10.	Bripda A. BERNOV ADDYNTIA P.	Polres Bojonegoro.	Anggota
11.	Bripda ACHMAD FARID C.	Polres Bojonegoro.	Anggota
12.	Bripka M. NURSALIM	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro.	Anggota
13.	Bripka KARWAPI	Subden C/3 Pelopor Brimob Bojonegoro.	Anggota
14.	BAMBANG PRIYANTO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
15.	MOCH. ZAINUDIN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
16.	ARIF HENDRIANTO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
17.	M. MUKTAR	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.	Anggota
18.	YAKOP FERI	Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bojonegoro.	Anggota

1 x 15

Lampiran 3 - Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Nomor : 188/0012/412.306/2019, Tentang Pembentukan Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Bojonegoro



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Jl. Ahmad Yani No. 06 Telepon (0353) 887811
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO
Nomor : 188/ 0012 /412.306/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN DAN OPERASI (PUSDALOPS) DAN
TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro, bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat membentuk Satuan Tugas Reaksi Cepat (Tim Reaksi Cepat/TRC) meliputi kaji cepat dan penyelamatan/ pertolongan dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. Bahwa untuk memudahkan penanganan dan koordinasi yang cepat, efektif, dan efisien, terpadu dan akuntabel, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dengan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

- 3 -

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro.

PERTAMA : Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Anggota Pusdalops sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk :

- a. Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyajidata dan informasi kebencanaan) secara rutin.
- b. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
- c. Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
- d. Melaksanakan Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.

- 4 -

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



NADIF ULFIA, S.Sos.

Penata Tk I

NIP. 19710225 199803 2 006

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

Lampiran II : Keputusan Kepala Pelaksana
 Nomor : 188 / 012 / 412.306/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)
 BPBD KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	MZ. BUDI MULYONO	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Penanggungjawab	
2	YUDI HENDRO K.	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Komandan	
3	EKO SUSANTO	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Wakil Komandan	
4	M. ZAINUDIN	Staf	Koord. Lapangan	Perwira Piket
5	BAMBANG PRIYANTO	Staf	Anggota	Perwira Piket
6	M. SAIFUL ASYHAR	Staf	Anggota	Perwira Piket
7	TRI WAHYUNI	Staf	Anggota	
8	HENING ANITA SARI	Staf	Anggota	
9	FATMAWATI	Staf	Anggota	
10	PURWATI	Staf	Anggota	
11	BAYU FERNILLA N.	Staf	Anggota	
12	ARIF HENDRIANTO	Staf	Anggota	
13	ADE JALU PRAKOSO	Staf	Anggota	
14	IMAM AGUNG S.	Staf	Anggota	
15	ARBANI KURNIAWAN	Staf	Anggota	
16	AHMAD SYAFIT	Staf	Anggota	
17	M. DICKY SIROJUDDIN	Staf	Anggota	
18	SUHARJITO	Staf	Anggota	
19	ALLDINO SATRIA P.	Staf	Anggota	
20	CATUR AGENG P.	Staf	Anggota	
21	ANGGA DANY IRAWAN	Staf	Anggota	
22	M. CHOIRUL IBAT	Staf	Anggota	
23	ADITYA PRATAMA	Staf	Anggota	

Pit. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO

NADIF ULFIA, S.Sos.
 Penata Tk I
 NIP. 19710225 199803 2 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Pelaksana
 Nomor : 188/ 012 /412.306/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
 PUSAT PENGENDALIAN OPERASI (PUSDALOPS)
 BPBD KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM OPD	JABATAN DALAM OPD	KETERANGAN
1	NADIF ULFIA	Sekretaris	Penanggungjawab	
2	MZ. BUDI MULYONO	Kasi Kedaruratan dan Logistik	Pengawas	616
3	EKO SUSANTO	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Manajer	705VP
4	PURWATI	Staf	Supervisor	
5	BRILLIANANTO M	Staf	Anggota	
6	DINA MUSTIKA	Staf	Anggota	
7	LORISTA WIJIASRI	Staf	Anggota	
8	LIANA CHICHA	Staf	Anggota	
9	A.CHOIRUL ARKANA	Staf	Anggota	
10	ANGGORO F	Staf	Anggota	
11	F. ROCHMAN HAKIM	Staf	Anggota	
11	HALIM PRAYOGO	Staf	Anggota	
13	ALFAN FAHRONI	Staf	Anggota	
14	AHMAD NUR FAISAL	Staf	Anggota	

Plt. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO



NADIF ULFIA, S.Sos.

Penata Tk I

NIP. 19710225 199803 2 006

Lampiran III : Keputusan Kepala Pelaksana
 Nomor : 188/ 012 /412.306/2019
 Tanggal : 02 Januari 2019

**DAFTAR REGU JAGA/PIKET
 TIM REAKSI CEPAT (TRC) DAN PUSDALOPS
 BPBD KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM REGU	KETERANGAN
REGU I			
	M. ZAINUDIN	Perwira	
1.	ARIF HENDRIANTO	TRC/Komandan Regu	
2.	AHMAD SYAFI	TRC	
3.	M. DICKY SIROJUDDIN	TRC	
4.	ANGGA DANY IRAWAN	TRC	
5.	HALIM PRAYOGO	PUSDALOPS	
6.	ALFAN FAHRONI	PUSDALOPS	
REGU II			
	M. SAIFUL ASYHAR	Perwira	
1.	ADE JALU PRAKOSO	TRC/Komandan Regu	
2.	SUHARJITO	TRC	
3.	ALLDINO SATRIA P	TRC	
4.	M. KHOIRUL IBAT	TRC	
5.	A.CHOIRUL ARKANA	PUSDALOPS	
6.	ANGGORO F.	PUSDALOPS	
REGU III			
	BAMBANG PRIYANTO	Perwira	
1.	ARBANI KURNIAWAN	TRC/Komandan Regu	
2.	IMAM AGUNG S.	TRC	
3.	CATUR AGENG P.	TRC	
4.	ADITYA PRATAMA	TRC	
5.	FATCHUL ROCHMAN	PUSDALOPS	
6.	AHMAD NUR FAISAL	PUSDALOPS	

Ptl. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN BOJONEGORO

NADIF ULFIA, S.Sos.

Penata Tk I

NIP. 19710225 199803 2 006

Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan

1. Bersama Bapak Arif selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Ledok



2. Bersama Bapak Ristony selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan



3. Bersama Bapak Muntasir Divisi Pendukung dan Hubungan Eksternal (*Corporate & Support Divisions*) dari ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)



4. Bersama Ibu Dr. Heri Mulyanti, S.Si., M.Sc selaku Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Bojonegoro



5. Bersama Bapak Supriyanto selaku Ketua RT 7/ Rw 1 Ledok Wetan



6. Bersama Bapak Gatot Supriadi selaku Destana



DATA PRIBADI

1. Nama : VALENTINO FEBRUAR HABIB PUTRA
2. NIM : 22632011013
3. Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 14 Februari 2004
4. Alamat : Jl. Perum Pondok Asri No.47 RT 002/RW 005
Desa Ledok Kulon Kabupaten Bojonegoro
5. Riwayat Pendidikan : 1. SDN Meri 2 Kota Mojokerto Lulus Tahun 2016
2. SMPN 1 Kota Mojokerto Lulus Tahun 2019
3. SMAN 1 Bojonegoro Lulus Tahun 2022
6. Pekerjaan : -
7. Publikasi atau Karya Ilmiah : -



Bojonegoro, 14 Juli 2026

Penulis



VALENTINO FEBRUAR HABIB PUTRA